

LITERATUR REVIEW : PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

Zahrona Hasibuan ^{*1}
Frisdianto Budi Saputro ²
Sari Sepriani Hasibuan ³
Rinny Meidiyustiani ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Budi Luhur, Indonesia
*e-mail : zahronahasibuan13@gmail.com , bagusaja1701@gmail.com, sarisepriani24@gmail.com,
Rinny.meidiyustiani@budiluhur.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep, elemen, pendekatan, manfaat, serta tantangan dalam pengukuran kinerja sektor publik. Melalui metode studi literatur, data dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah, buku referensi, dan dokumen kebijakan pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengukuran kinerja yang efektif harus mencakup enam elemen utama: input, proses, output, outcome, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, fokus pengukuran di sektor publik meliputi akuntabilitas, transparansi, pengambilan keputusan berbasis data, dan kepuasan masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi Value for Money, Balanced Scorecard, dan Key Performance Indicators (KPI), yang masing-masing memiliki keunggulan dalam mengevaluasi kinerja organisasi secara holistik. Tantangan yang dihadapi meliputi minimnya data valid, resistensi birokrasi, serta keterbatasan indikator yang sesuai dengan kondisi lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengukuran kinerja harus menjadi bagian integral dalam reformasi birokrasi untuk mendorong pelayanan publik yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Kata Kunci: Kinerja Sektor Publik, Akuntabilitas, Evaluasi, Balanced Scorecard, Value for Money

Abstract

This study aims to comprehensively examine the concepts, elements, approaches, benefits, and challenges in measuring public sector performance. Using a literature review method, data were collected from academic journals, reference books, and government policy documents. The findings reveal that effective performance measurement must include six key elements: input, process, output, outcome, efficiency, and effectiveness. The performance focus in the public sector includes accountability, transparency, data-driven decision-making, and public satisfaction. Commonly applied approaches such as Value for Money, Balanced Scorecard, and Key Performance Indicators (KPI) each offer advantages in evaluating organizational performance holistically. Challenges include limited access to valid data, bureaucratic resistance, and insufficiently contextual indicators. The study concludes that performance measurement must become an integral part of bureaucratic reform to promote accountable and results-oriented public service.

Keywords: Public Sector Performance, Accountability, Evaluation, Balanced Scorecard, Value for Money

PENDAHULUAN

Sektor publik memiliki peranan penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan dasar dan pembangunan berkelanjutan. Kinerja sektor publik menjadi sorotan karena keberhasilan pemerintah sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, tantangan dalam pengukuran kinerja sektor publik masih sangat kompleks, mulai dari keterbatasan indikator yang obyektif hingga lemahnya sistem evaluasi yang akuntabel.

Permasalahan klasik dalam birokrasi seperti inefisiensi, tumpang tindih wewenang, hingga lemahnya pengawasan menjadikan pengukuran kinerja bukan hanya sebuah alat administratif, tetapi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengukuran yang komprehensif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan serta kebutuhan masyarakat.

Kompleksitas tugas-tugas yang dihadapi entitas publik sering kali menuntut sebuah sistem evaluasi yang kuat guna memastikan bahwa tujuan-tujuan strategis tercapai dengan efisien dan efektif. Di dalam lingkungan yang terus berubah ini, pengukuran kinerja telah menjadi landasan esensial bagi penilaian yang akurat terhadap pencapaian, manajemen sumber daya, dan

perbaikan berkelanjutan dalam sektor publik. Dengan memahami dan mengaplikasikan metode pengukuran kinerja yang tepat, entitas publik dapat memetakan pencapaian terhadap tujuan-tujuan strategis, mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya, dan memperkuat kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan (Judijanto, 2024).

Pengukuran kinerja dalam sektor publik berperan penting sebagai alat manajemen strategis yang mampu memberikan gambaran obyektif mengenai tingkat pencapaian tujuan organisasi, efektivitas program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik, lembaga sektor publik dapat mengidentifikasi kelemahan, meningkatkan kinerja, serta mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Beragamnya tujuan, sulitnya mengukur output dan outcome, serta pengaruh faktor politik menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan sistem pengukuran kinerja yang efektif. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, elemen, aspek, manfaat, hingga sistem pengukuran kinerja sektor publik sangatlah penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi hasil kerja dari periode yang lalu. Sehubungan dengan hal itu, pengukuran kinerja sebaiknya dilakukan secara komprehensif, sehingga pengambilan keputusan berkaitan dengan strategi dapat dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian strategi tersebut akan dapat mengakomodasi setiap perspektif yang terlibat dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Penilaian kinerja berdasarkan rasio keuangan memang merupakan hal umum, namun adanya persaingan yang ketat menuntut perusahaan untuk memikirkan potensi yang dapat dikembangkan dimasa depan (berpikir strategik). Rasio keuangan hanya memberikan fokus pada pencapaian hasil keuangan jangka pendek, sehingga perusahaan tidak dapat mencapai tujuan keuangan jangka panjang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik yang digunakan adalah **studi literatur (*literature review*)** terhadap berbagai referensi ilmiah, dokumen kebijakan publik, laporan tahunan instansi pemerintah, serta jurnal-jurnal nasional dan internasional. Literatur yang dianalisis dipilih berdasarkan relevansi dengan tema pengukuran kinerja sektor publik.

Data sekunder yang diperoleh dikaji dan dikelompokkan berdasarkan kategori metode pengukuran, indikator kinerja, serta pendekatan evaluatif. Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis*, dengan fokus pada validitas konsep, keterukuran indikator, dan dampak terhadap perbaikan layanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai, mengukur, dan mengevaluasi kinerja organisasi secara obyektif berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan. Pengukuran ini berfungsi untuk memantau perkembangan kinerja, mengidentifikasi permasalahan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Pengukuran kinerja menjadi salah satu faktor terpenting bagi organisasi swasta maupun publik. Hal ini dikarenakan hasil dari pengukuran tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan juga sebagai tolok ukur dalam memonitor berhasil atau tidaknya strategi kinerja yang telah dilaksanakan suatu organisasi termasuk juga pada organisasi sektor publik atau organisasi nirlaba. Organisasi sektor publik atau organisasi nirlaba merupakan organisasi yang berfokus pada pelayanan terhadap publik serta mengelola dana publik (Anggraini, A. M., Sari, R. M., & Fristiani, N. 2020).

Kinerja secara umum diartikan sebagai hasil atau prestasi kerja yang dicapai oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tujuan, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam konteks sektor publik, kinerja tidak semata-mata diukur dari efisiensi keuangan, tetapi lebih luas mencakup efektivitas pelayanan publik, tingkat kepuasan masyarakat, serta pencapaian tujuan sosial dan kebijakan public (Kariyoto 2017).

Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sektor publik mencakup beberapa elemen pokok yang saling berkaitan yaitu input, proses, output, outcome, efisiensi, dan efektivitas. Input menggambarkan sumber daya yang digunakan seperti anggaran, SDM, dan fasilitas. Proses mencerminkan bagaimana kegiatan dilakukan untuk menghasilkan pelayanan. Output adalah hasil langsung dari kegiatan, seperti jumlah dokumen atau layanan yang diberikan. Outcome menilai dampak jangka panjang terhadap masyarakat dari output yang dihasilkan. Efisiensi mencerminkan sejauh mana sumber daya dimanfaatkan dengan optimal. Sementara efektivitas menunjukkan ketercapaian tujuan strategis dari sebuah program atau kegiatan. Keenam elemen ini harus dianalisis secara terpadu untuk memberikan gambaran kinerja yang akurat dan menyeluruh.

Elemen-elemen ini penting untuk memastikan bahwa pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana proses pelayanan dijalankan secara efisien dan efektif.

Fokus Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Fokus utama dari pengukuran kinerja sektor publik adalah membangun sistem yang mendorong akuntabilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas mengarah pada kemampuan organisasi mempertanggungjawabkan hasil kerja secara terbuka. Transparansi memberikan akses informasi publik terhadap kinerja instansi pemerintah. Peningkatan kinerja mencakup upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas dan kecepatan layanan. Pengambilan keputusan berbasis data dapat dilakukan lebih efektif dengan adanya pengukuran yang baik. Selain itu, kepuasan masyarakat menjadi ukuran utama keberhasilan pelayanan publik. Dengan fokus tersebut, lembaga sektor publik mampu mempertahankan kepercayaan dan legitimasi di mata publik.

Dengan fokus ini, organisasi sektor publik dapat mengelola kinerja secara berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja sektor publik memiliki banyak manfaat strategis yang mendukung efektivitas pemerintahan. Pertama, pengukuran menjadi alat monitoring yang sistematis terhadap pelaksanaan program kerja. Kedua, ia membantu dalam evaluasi capaian kegiatan serta penggunaan anggaran. Ketiga, pengukuran memberikan dasar objektif bagi pengambilan keputusan kebijakan yang tepat. Keempat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan melalui pelaporan kinerja yang terbuka. Kelima, adanya pengukuran yang sehat dapat mendorong kompetisi positif antarunit kerja. Keenam, hasil pengukuran dapat dijadikan umpan balik untuk penyusunan perencanaan strategis berikutnya (Mardiasmo, 2022).

Sistem Pengukuran Kinerja

Sistem pengukuran kinerja yang efektif dalam sektor publik harus mencakup lima komponen utama. Pertama, **perencanaan kinerja**, yaitu menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator dengan jelas dan terukur. Kedua, **pengukuran kinerja**, yakni proses pengumpulan data dan pelaporan hasil secara periodik. Ketiga, **pelaporan kinerja**, yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel kepada publik dan pengawas. Keempat, **evaluasi kinerja**, berupa penilaian pencapaian sasaran dan pemetaan hambatan. Kelima, **umpan balik**, sebagai dasar perbaikan dan inovasi dalam pelaksanaan program. Sistem ini mendukung prinsip *good governance* dan memperkuat budaya kerja berbasis kinerja..

Sistem pengukuran kinerja yang baik akan membantu organisasi sektor publik dalam melaksanakan prinsip *good governance*, menciptakan budaya kerja yang produktif, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Konsep Dasar Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja dalam sektor publik merupakan proses sistematis untuk menilai tingkat keberhasilan organisasi publik dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk mewujudkan akuntabilitas publik, meningkatkan efisiensi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Nainggolan, 2024).

Pengukuran kinerja sektor publik juga merupakan fondasi penting dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk menilai sejauh mana kinerja organisasi publik dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berbeda dengan sektor bisnis yang mengejar profit, sektor publik menekankan keberhasilan melalui pencapaian sosial dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran kinerja di sektor ini memerlukan pendekatan yang bersifat multidimensi. Dalam konteks tersebut, penting untuk memahami bahwa pengukuran kinerja bukan hanya alat administratif, tetapi juga instrumen strategis yang mendukung perbaikan berkelanjutan dan efisiensi birokrasi.

Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik

Setiap aktivitas atau kegiatan dalam organisasi dilakukan untuk mendukung program atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Tercapainya program atau tujuan tercermin dalam kinerja organisasi. Kinerja dipengaruhi oleh banyak faktor. Kinerja dapat dipengaruhi tidak hanya orang namun juga kegiatan yang dilakukan sehingga pengukuran kinerja harus dapat mencakup banyak faktor tersebut secara komprehensif. Kinerja organisasi publik diidentifikasi dengan keberhasilan organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengukuran kinerja merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk menilai luaran dari suatu kegiatan terhadap target dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja menjelaskan secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan luaran yang dicapai.

Pendekatan Pengukuran Kinerja

Beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam sektor publik antara lain:
Value for Money (VfM): menilai dari tiga aspek: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Balanced Scorecard (BSC): diterapkan dalam organisasi publik untuk menyeimbangkan indikator keuangan dan non-keuangan, termasuk kepuasan masyarakat.
Key Performance Indicators (KPI): indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja unit kerja atau individu.

Tantangan dalam Pengukuran Kinerja

Meskipun penting, pengukuran kinerja sektor publik menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya data yang valid dan mutakhir sebagai dasar penilaian. Selain itu, terdapat resistensi dalam budaya birokrasi terhadap transparansi dan perubahan. Indikator yang digunakan sering kali tidak sesuai dengan realitas lapangan atau terlalu rumit untuk diimplementasikan. Fokus pengukuran yang sempit hanya pada input dan output mengabaikan aspek hasil jangka panjang (*outcome*). Terakhir, keterbatasan teknologi dan kapasitas SDM juga menghambat pengukuran kinerja secara optimal.

KESIMPULAN

Pengukuran kinerja sektor publik merupakan instrumen strategis yang esensial untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbeda dengan sektor bisnis, fokus pengukuran kinerja sektor publik melampaui capaian finansial, menekankan pada dampak sosial (*outcome*) dan kepuasan masyarakat. Elemen-elemen

seperti input, proses, output, outcome, efisiensi, dan efektivitas harus diukur secara komprehensif untuk memberikan gambaran kinerja yang menyeluruh.

Manfaat pengukuran kinerja di sektor publik sangat signifikan, termasuk peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, dukungan terhadap pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan kepercayaan publik, dan dorongan untuk inovasi. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, diperlukan sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi, mulai dari perencanaan yang jelas, pengukuran yang sistematis, pelaporan yang transparan, evaluasi yang objektif, hingga umpan balik yang konstruktif. Dengan demikian, pengukuran kinerja menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Judijanto, L., & Afandy, C. (2024). Pengukuran kinerja sektor publik.
- Anggraini, A. M., Sari, R. M., & Fristiani, N. (2020). Implementasi metode balanced scorecard sebagai tolok ukur pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 1(2), 58-70.
- Kariyoto, K. (2021). Implementasi Value For Money, Input Output Outcome dan Best Value Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(1), 72-82.
- Fitriyani, D. (2020). Balanced scorecard: alternatif pengukuran kinerja organisasi sektor publik. *Jurnal Cakrawala Akuntansi ISSN*, 4851.
- Nainggolan, I. R. G., Lubis, P. K. D., Benediktus, R., & Simanjuntak, Y. (2024). PERAN PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(4), 758-765.
- Rahayuningsih, D. A., & Syaflan, M. (2024). PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK: ANALISA PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN INSTANSI BERDASARKAN CAPAIAN REALISASI ANGGARAN. *JURNAL AKUNIDA*, 10(2), 104-113.
- Rambe, F. A. F., Azma, R. A., Simarmata, M. C. A. B., Nasirwan, N., Basem, Z., & Marina, N. (2024). Literature Review: Pengukuran Kinerja Sektor Publik di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 06-11.
- Silaban, A. N., Lismono, T. T., & Silaen, E. (2024). Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Menggunakan Metode Value For Money Pada Pemprov DKI Jakarta. *Media Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 1-6.
- Mardiasmo. (2022). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2020). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (2023). *Pedoman Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: KemenPAN-RB.
- Nurhayati, N. (2023). Evaluasi Kinerja Organisasi Publik: Kajian Teoritis dan Praktis. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 1-10.
- Sihombing, A. (2022). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Balanced Scorecard. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 134-145.
- Arifianto, D., & Lestari, R. (2021). Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Menggunakan Pendekatan Outcome-Based. *Jurnal Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*, 6(1), 21-34.
- Wijayanti, E., & Prabowo, H. (2019). Peran Indikator Kinerja Utama dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 16(3), 202-215.